

Bappenas: Bandara Kertajati Difasilitasi PINA Tahun Ini

[JAKARTA] Pemerintah memastikan tiga proyek strategis akan mendapatkan pendanaan menggunakan skema pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA) sebelum akhir tahun.

Ketiga proyek tersebut adalah Bandara Kertajati di Jawa Barat, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Aceh dan sebagian ruas tol Trans Jawa yang dimiliki oleh Waskita Toll Road.

“Kita harap sebelum akhir tahun ini sudah deal tiga proyek. Sebagian jalan tol Trans Jawa, pembangkit listrik di Aceh, dan Bandara Kertajati,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro usai membuka Konferensi FIDIC International Infrastructure 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Dia mengharapkan creative financing untuk infrastruktur sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo ini menjadi solusi untuk pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan alokasi dana APBN untuk mengatasi ke-

miskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.

Bambang mengaku, pihaknya tengah bernegosiasi dengan perusahaan pembiayaan asal China yang ingin berinvestasi lewat skema PINA, khusus untuk proyek

sembilan ruas jalan tol yang dimiliki oleh Waskita Toll Road.

“Ini masih berproses. Mungkin kepastiannya sekitar pertengahan sampai akhir Oktober. Dia tertarik untuk masuk ke jalan Tol Trans Jawa. Nilainya saya lupa, tapi

persisnya, ada yang dibutuhkan oleh Waskita,” ujarnya.

PT Waskita Toll Road sebelumnya dikabarkan tengah mencari tambahan dana pembangunan ruas tol dengan melepas sebagian kepemilikan saham di sembilan perusahaan pengelola jalan tol yang

diestimasi sekitar Rp 8 triliun.

Untuk Bandara Kertajati yang didukung penuh Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan, saat ini dalam proses penerbitan rekasa dana penyertaan terbatas (RDPT) dengan nilai Rp 950 miliar, yang dibantu penasihat keuangan PT SMI dan manajer investasi PT Dana-reksa Investment Management.

Konferensi Infrastruktur

Di sisi lain, Konferensi FIDIC International Infrastructure 2017 yang dibuka oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono kemarin menekankan perlunya ketahanan infrastruktur khusus terhadap bencana alam.

Kegiatan ini diikuti sekitar 600 peserta yang terdiri dari para pengambil keputusan, profesional, ahli, dan akademisi dari lebih dari 70 negara yang akan mendiskusikan dan membahas berbagai aspek dan perkembangan mutakhir terkait ketahanan

infrastruktur.

Presiden FIDIC (*the International Federation of Consulting Engineers*) Jae-Wan Lee mengatakan, dengan meningkatnya bencana di berbagai belahan dunia, banyak negara melaksanakan pembangunan infrastruktur. Namun, tidak memberikan hasil maksimal karena lemahnya pemahaman mengenai aspek ketahanan infrastruktur.

“Untuk beberapa jenis bencana yang akan terjadi, kita perlu menyiapkan pencegahan, mitigasi, semua proses dari awal. Jadi, infrastruktur yang tangguh harus kita pertimbangkan,” kata Jae-Wan Lee pada pembukaan konferensi di JCC Senayan Jakarta.

Dalam laporannya Antara menyebutkan ada beberapa topik yang akan dibahas dalam konferensi yang diadakan 1-3 Oktober 2017 ini, di antaranya pengalaman penanganan infrastruktur akibat gempa di Jepang, peningkatan batas ketinggian laut dan dampak terhadap terjadinya banjir di Amerika dan Indonesia. [ID/M-6]